

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung. Refika Aditama. 2017.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2008.

Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Seri Peraturan Jabatan Notaris)*. Taman Sidoarjo. Zifatama Publisher. 2014.

Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2013.

Fortuna, Fanny, Niqo Ruma Azizi, Muldian David Maharif, Agnesia Devi, Clara Cleoney, Dinda Ayu Astari, Hanna Yustisha Hapsari, Dzulfa Istihfariyah, Diyah Ayu Riyanti, Hanifati Nur Amalina, Latifa Dwi Apriliana, Mutiara Ramadhani, Endom Gultom, Galuh Ayuning Putpraya, Andrasita Novinda, Dimas Prasetyo, Lanang Kukuh Wicaksono, Tio Eka Fatria, Dinta Fatimah Azahra, Siti Hanifah, Mutiara Maharani Nashir. *Pedoman Hukum Acara Pidana*. Magelang. Pustaka Rumah Cinta. 2021.

Gayo, Ahyar Ari. *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan, Dan Perbuatan Pidana)*. Jakarta Selatan. Balitbangkumham Press. 2020.

HS, Salim. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. 2018.

Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. 2018.

J, Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV. Remadja Karya.

Khaleed, Badriyah. *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta. Medpress Digital. 2014.

S. Laurensius Arliman. *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*.

Yogyakarta. Deep Publish. 2015.

Sumardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1986.

Soekanto, Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2015.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta. Deep Publisher. 2018.

Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta. Mitra Wacana Media. 2018.

Syahrur, Muhammad, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau. Dotplus Publisher. 2022.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika. 2002.

B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

Afifah, Kunni. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. *Lex Renaissance*. Vol. 2 Nomor. 1. Yogyakarta. 2017. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7999/pdf>

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Peneitian Kualitatif”. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. Universitas Negeri Yogyakarta. Vol. 21. Yogyakarta. 2021. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>

Maradesa, Krisdianto R. “Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris”. *Lex Privatum*. Vol. 2 Nomor. 3. Sulawesi Utara. 2014. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6167>

Margaret, Anastasia Lucia, dan Budidarmono, Fully Handayani. “Implikasi Yuridis Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Sirkuler Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2019/PTUN-JKT)”. *Indonesian Notary*.

Vol. 2 Nomor. 2. Jakarta Pusat. 2020.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1291&context=notary>

Mariati, Weni, Maryano, dan Nurwidiatmo. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Akibat Peralihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham”. Jurnal Nuansa Kenotariatan. Vol. 4 Nomor. 1. Jakarta Timur. 2018.
<https://www.neliti.com/publications/473790/tanggung-jawab-notaris-terhadap-perjanjian-pengikatan-jual-beli-saham-akibat-per>

Nurchaya, Satria Mega. “Perlindungan Oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Ikatan notaris Indonesia (INI) Terhadap Notaris yang Dipanggil Penyidik Terkait Akta yang Dibuatnya di Kabupaten Klaten”. Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2020.

Rizqillah, Intan Novia Putri, Arief Suryono, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. “Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Didasarkan Dokumen Palsu. Seminar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”. Vol. 3 Nomor. 1. Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai. Lampung. 2022.
<https://jurnal.saburai.id/index.php/PSN/article/view/1865>

Roziq, Moh. Saifulloh. “Pemeriksaan dan Penyitaan Akta Notaris Guna Kepentingan Penegakan Hukum Pidana Tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 22. Nomor. 4. Sulawesi Selatan. 2022
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/2895/pdf_1

Sakti, Abdurrahim Sambaditya Bima. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatan”. Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta Pusat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 147/Pid.B/2022/PN Dps.

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 36/PID/2022/PT DPS

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1134K/Pid/2022

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 88/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL

D. Sumber Lain

Kamus besar bahasa Indonesia. “Akta”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akta> (diakses tanggal 15 September 2023 pukul 21.45 Waktu Indonesia Bagian barat).

Pengadilan Agama Pulang Pisau, “Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan”, <http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1808-perbedaan-peradilan-dengan->

[pengadilan](#), (diakses tanggal 13 Maret 2023 pukul 17.18 Waktu Indonesia Bagian Tenggara.